PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS* DAN KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH

Skripsi Oleh :

HANNY TRI PUTRI

01021181823178

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, *DERAJAT* DESENTRALISASI FISKAL, FISCAL STRESS DAN KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH

Disusun Oleh:

Nama	: Hanny Tri Putri
NIM	: 01021181823178
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian	: Keuangan Daerah

TANGGAL PERSETUJUAN	**DOSEN PEMBIMBING**
Tanggal 6 Juni 2022	Ketua: Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.S.i NIP. 196007101987031003
Tanggal 30 Mei 2022	Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, *FISCAL STRESS* DAN KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH

Disusun Oleh:

Nama	**: Hanny Tri Putri**
NIM	**: 01021181823178**
Fakultas	**: Ekonomi**
Jurusan	**: Ekonomi Pembangunan**
Bidang Kajian/Konsentrasi	**: Keuangan Daerah**

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 Juli 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang,

Ketua	Anggota	Anggota
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si	Ferry Marissa, S.E., M.Si	Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 196007101987031003	NIP. 199004072018032001	NIP. 197403252009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 31-8-2022

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hanny Tri Putri

NIM : 011021181823178

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.S.i

Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 12 Juli 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 23 Agustus 2022
Pembuat Pernyatan,

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 31-8-2022
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

METERAI TEMPEL
D76AJX958182901

Hanny Tri Putri
NIM. 01021181823178

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah". Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Palembang, 22 Agustus 2022

Hanny Tri Putri
01021181823178

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama berjalannya proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya selaku hamba-Nya sehingga diberikan kelancaran selama penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Almarhum Ayahanda Helmy dan Ibunda Jumai Suryati yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa sehingga saya bisa mendapat kelancaran dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. dan Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya serta telah membantu dalam memberikan kritik, saran dan masukan untuk skripsi saya.
5. Bapak Dr. Suhel, S.E M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat untuk saya ketika saya butuh bimbingan akademik selama menjalani proses perkuliahan.

6. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Para dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah bersedia memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.
8. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Kampus Indralaya dan semua pihak yang pernah hadir dalam hidup penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 22 Agustus 2022

Penulis,

Hanny Tri Putri
01021181823178

ABSTRAK

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah

Oleh:

Hanny Tri Putri; Didik Susetyo; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah antarprovinsi Pulau Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari data *cross section* yaitu 10 provinsi di Pulau Sumatera dan data *time series* yaitu data tahun 2010-2020. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan keterbukaan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah sedangkan *fiscal stress* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah dan keterbukaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Implikasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah membatasi ekspor dan impor, karena menurut hasil penelitian variabel keterbukaan ekonomi meningkatkan ketimpangan wilayah, sehingga untuk mengurangi ketimpangan wilayah diperlukan pembatasan ekspor dan impor.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Keterbukaan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah

Ketua,

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anggota,

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

ABSTRACT

The Effect of Economic Growth, Degree of Fiscal Decentralization, *Fiscal Stress*, and Economic Openness on Regional Inequality

By:

Hanny Tri Putri; Didik Susetyo; Feny Marissa

This study aims to determine the effect of economic growth, degree of fiscal decentralization, fiscal stress and economic openness on regional disparities between provinces in Sumatra. The data used in this study is panel data consisting of cross section namely 10 provinces on the island of Sumatra and time series data, namely data from 2010-2020. The method used in this study is panel data regression analysis method using Random Effect Model. The results showed that simultaneously economic growth, degree of fiscal decentralization, fiscal stress and economic openness had an effect on regional inequality. Partially, economic growth and the degree of fiscal decentralization have a negative but not significant effect on regional inequality, while fiscal stress has a positive but not significant effect on regional inequality and economic openness has a positive and significant effect on regional inequality. The implication of this research is that the government should limit exports and imports, because according to the results of the study, the variable of economic openness increases regional inequality, so to reduce regional inequality, it is necessary to limit exports and imports.

Keywords: Economic Growth, Degree of Fiscal Decentralization, Fiscal Stress, Economic Openness, Regional Inequality

Chairman,

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Member,

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Approved by,
Head of Development Economics Department

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Hanny Tri Putri
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 22 Juni 2022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat Rumah	: Jl. Jendral Bambang Utoyo Lr. Sianjur III No.255 RT 01, RW 01, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 5 Ilir
Alamat Email	: hannytriputri4@gmail.com
Nomor Handphone	: 0895326408527

PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012	: SD Negeri 53 Palembang
2012-2015	: SMP Negeri 42 Palembang
2015-2018	: SMA Negeri 18 Palembang
2018-2022	: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPERHENSIF…….. i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ……..... ii

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ……..… iii

KATA PENGANTAR ……. iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

ABSTRAK ……...vii

ABSTRACT ……... viii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ……..… ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 12

1.3 Tujuan Penelitian..... 12

1.4 Manfaat Penelitian..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

2.1 Landasan Teori 14

2.1.1 Konsep Ketimpangan Wilayah 14

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi..... 17

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 20
2.1.3 Desentralisasi Fiskal 21
2.1.4 Derajat Desentralisasi Fiskal 23
2.1.5 Fiscal Stress 24
2.1.6 Keterbukaan Ekonomi 27
2.2 Penelitian Terdahulu 29
2.3 Kerangka Pikir 31
2.4 Hipotesis Penelitian 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 34
3.2 Jenis dan Sumber Data 34
3.3 Metode Pengumpulan Data 34
3.4 Metode Analisis Data 35
3.4.1 Regresi Data Panel 35
3.4.2 Model Regresi Data Panel 36
3.4.2.1 *Common Effect Model* (CEM) 36
3.4.2.2 *Fixed Effect Model* (FEM) 37
3.4.2.3 *Random Effect Model* (REM) 37
3.4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel 38
3.4.3.1 Uji Chow 38
3.4.3.2 Uji Hausman 38
3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 38
3.4.4 Uji Asumsi Klasik 39
3.4.4.1 Uji Normalitas 39

3.4.4.2 Uji Multikolineritas 39
3.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 39
3.4.5 Uji Hipotesis 40
3.4.5.1 Uji F (Simultan) 40
3.4.5.2 Uji t (Parsial) 40
3.4.6 Koefisien Determinasi 40
3.5 Definisi Operasional Variabel 41
3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi 41
3.5.2 Derajat Desentralisasi Fiskal 41
3.5.3 Fiscal Stress 41
3.5.4 Keterbukaan Ekonomi 42
3.5.5 Ketimpangan Wilayah 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Gambaran Umum 43
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 44
4.1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi di Pulau Sumatera 45
4.1.3 *Fiscal Stress* Provinsi di Pulau Sumatera 47
4.1.4 Keterbukaan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera 49
4.1.5 Ketimpangan Wilayah Provinsi di Pulau Sumatera 50
4.2 Hasil Regresi Data Panel 52
4.2.1 Model Regresi Data Panel 52
4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel 53
4.2.2.1 Uji Chow 53
4.2.2.2 Uji Hausman 54

4.2.2.3 Uji *Lagrange Multiplier* (LM) 55
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 55
4.2.3.1 Uji Normalitas 55
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 56
4.2.4 Analisis Regresi Data Panel 57
4.2.5 Uji Hipotesis 58
4.2.5.1 Uji F (Simultan) 58
4.2.5.2 Uji t (Parsial) 59
4.2.6 Koefisien Determinasi 60
4.3 Pembahasan 61
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah 61
4.3.2 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah 62
4.3.3 Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Ketimpangan Wilayah 64
4.3.4 Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah 65
4.3.5 Interpretasi Koefisien Hasil Analisis 66

BAB V PENUTUP 69
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2020 4

Tabel 2. 1 Kriteria Angka Indeks Williamson 16

Tabel 2. 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 24

Tabel 4. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2020 44

Tabel 4. 2 Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2020 46

Tabel 4. 3 Model Regresi Data Panel 52

Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow 54

Tabel 4. 5 Hasil Uji Hausman 54

Tabel 4. 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier 55

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas 56

Tabel 4. 8 Hasil Regresi Data Panel Dengan Random Effect Model 57

Tabel 4. 9 Uji F 59

Tabel 4. 10 Hasil Uji t 59

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Random Effect Model Provinsi di Pulau Sumatera 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020..... 5

Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020 (Miliar Rupiah)..... 7

Gambar 1. 3 Ekspor dan Impor Antar Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020 (Juta USD) 10

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi 18

Gambar 2. 3 Kerangka Pikir..... 32

Gambar 4. 1 Peta Pulau Sumatera 43

Gambar 4. 2 Fiscal Stress di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2020 48

Gambar 4. 3 Keterbukaan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2020 49

Gambar 4. 4 Ketimpangan Antar Wilayah Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2010-2020..... 51

Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian 77

Lampiran 2 Data Penelitian Transformasi LN 80

Lampiran 3 Uji Chow 83

Lampiran 4 Uji Hausman 84

Lampiran 5 Uji Lagrange Multiplier 85

Lampiran 6 Common Effect Model 86

Lampiran 7 Fixed Effect Model 87

Lampiran 8 Random Effect Model 88

Lampiran 9 Uji Normalitas 89

Lampiran 10 Uji Multikolinearitas 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sistem multidimensional yang dapat memajukan kualitas suatu bangsa yang mengaitkan berbagai macam transisi yang berpokok pada sistem sosial, tingkah laku masyarakat serta majelis nasional seperti pemecahan masalah kemiskinan, cepatnya pertumbuhan dan berkurangnya ketimpangan (Todaro & Smith, 2006). Manusia berperan penting dalam menjalankan pembangunan ekonomi yakni sebagai tenaga kerja, komponen pembangunan dan konsumen dari hasil pembangunan tersebut.

Pada dasarnya pembangunan daerah dan pembangunan nasional mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mensejahterakan masyarakat dengan adil dan merata serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mengeksplorasi sumber-sumber yang memiliki potensi secara maksimal. Kesuksesan pembangunan nasional sangat menentukan kesuksesan pembangunan daerah (Susetyo, 2009).

Salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai kesuksesan suatu daerah ialah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan begitu pemerintah selalu memasang target laju pertumbuhan dalam perencanaannya, tujuannya agar dapat mengendalikan ketimpangan yang terjadi antar kabupaten serta kota. Pertumbuhan

ekonomi ialah proses peningkatan kapabilitas produksi suatu perekonomian, yang dimanifestasikan sebagai peningkatan pendapatan nasional (Akbar, 2018).

Dalam cakupan suatu negara pembangunan tidak seluruhnya merata. Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan tersebut akan mengakibatkan ketimpangan antar wilayah. Salah satu faktor terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu karena pertumbuhan tiap wilayah yang berbeda-beda, ada yang mengalami pertumbuhan cepat dan ada juga yang lambat. Pertumbuhan yang tidak sama disebabkan karena tiap wilayah mempunyai potensi yang berbeda-beda, beberapa investor lebih memilih berinvestasi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan serta tidak meratanya alokasi pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Aulya, 2016).

Fenomena ketimpangan antar wilayah yang menjadi persoalan pembangunan di Indonesia tidak hanya dialami oleh Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa pun mengalami ketimpangan. Ketimpangan antar wilayah tergambar dalam distribusi SDM, industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, pendidikan serta sampai pada sektor pertanian. Ketimpangan inilah yang akan mempengaruhi kinerja untuk tumbuh yang pada gilirannya bisa menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat pada beberapa daerah sedangkan pada daerah lainnya pertumbuhan bergerak lebih lambat. Pertumbuhan yang berbeda tersebut akan berimbas pada ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia (Akbar, 2018)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah yakni, perbedaan potensi yang dimiliki daerah sangat besar, keadaan sosial

dan budaya antar daerah yang bervariasi serta adanya perbedaan kedudukan demografis dan ketenagakerjaan. Terbatasnya mobilitas barang-barang dan orang antar wilayah juga menimbulkan ketimpangan pembangunan wilayah. Perbedaan yang dimiliki tiap wilayah menjadi penyebabnya dan akibatnya kompetensi suatu daerah dalam memajukan proses pembangunan juga menjadi berbeda (Sjafrizal, 2008). Perbedaan tingkat pembangunan suatu wilayah mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang pada akhirnya akan membawa dampak pada ketimpangan wilayah yang makin besar (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan dasar pokok tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan akan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi suatu wilayah tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menjadi penting lagi bagi golongan miskin jika tidak diiringi dengan menurunnya ketimpangan pendapatan. (Aulya, 2016).

Saat ini tiap wilayah diminta untuk mengendalikan sendiri potensi yang dimiliki. Potensi harus dikendalikan dengan tepat sehingga bisa menggerakkan proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang bagus serta pertumbuhan ekonomi yang baik juga maka dari itu fenomena ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terdepan dan wilayah yang terbelakang bisa menurun.

Provinsi yang ada di Pulau Sumatera merupakan wilayah yang tidak terkecualikan dari persoalan ketimpangan dengan adanya sepuluh provinsi di Pulau Sumatera yang pastinya mempunyai potensi, sektor-sektor unggulan serta

persoalan yang berbeda-beda. Ketimpangan wilayah sepuluh provinsi Pulau Sumatera dapat dilihat berdasarkan suatu indikator ketimpangan wilayah yaitu salah satunya adalah Indeks Williamson. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah :

Tabel 1. 1 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2020

Provinsi	Indeks Williamson											Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aceh	0,50	0,48	0,47	0,51	0,41	0,45	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,41
Sumut	0,66	0,67	0,55	0,58	0,58	0,58	0,56	0,57	0,57	0,58	0,56	0,59
Sumbar	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,30	0,26
Riau	0,55	0,56	0,53	0,48	0,44	0,42	0,39	0,37	0,35	0,33	0,30	0.43
Jambi	0,53	0,52	0,51	0,50	0,48	0,42	0,44	0,46	0,49	0,47	0,44	0,48
Sumsel	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,66	0,74	0,71
Bengkulu	0,12	0,11	0,11	0,13	0,12	0,12	0,12	0,14	0,12	0,49	0,12	0,15
Lampung	0,30	0,30	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,26	0,27
Kep.Babel	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19
Kep Riau	0,55	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,46	0,45	0,44	0,50
Sumatera	0,43	0,43	0,41	0,41	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,41	0,37	0,40

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson (IW) yang tersaji pada Tabel 1.1 dapat diketahui pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera selama periode 2010-2020 tercatat sebesar 0,40 dimana tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Provinsi dengan nilai Indeks Williamson tertinggi di Pulau Sumatera selama 2010-2020 adalah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,71 artinya ketimpangan di Provinsi Sumatera Selatan tergolong tinggi. Provinsi dengan nilai Indeks Williamson terendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 0,15 artinya ketimpangan di Provinsi Bengkulu tergolong rendah. Berdasarkan nilai indeksnya, terlihat jarak yang cukup jauh antara provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi dan provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah, ini berarti pembangunan di

Pulau Sumatera tidak merata. Perbedaan yang dimiliki tiap provinsi menjadi salah satu faktor tidak meratanya pembangunan yang akan membawa dampak pada ketimpangan antar wilayah.

Perbedaan yang dimiliki masing-masing wilayah dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan masing-masing wilayah juga berbeda karena itu dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi patokan apakah pembangunan yang dilaksanakan berhasil atau tidak. Masih ada parameter lain, namun pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan. Berikut Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 :

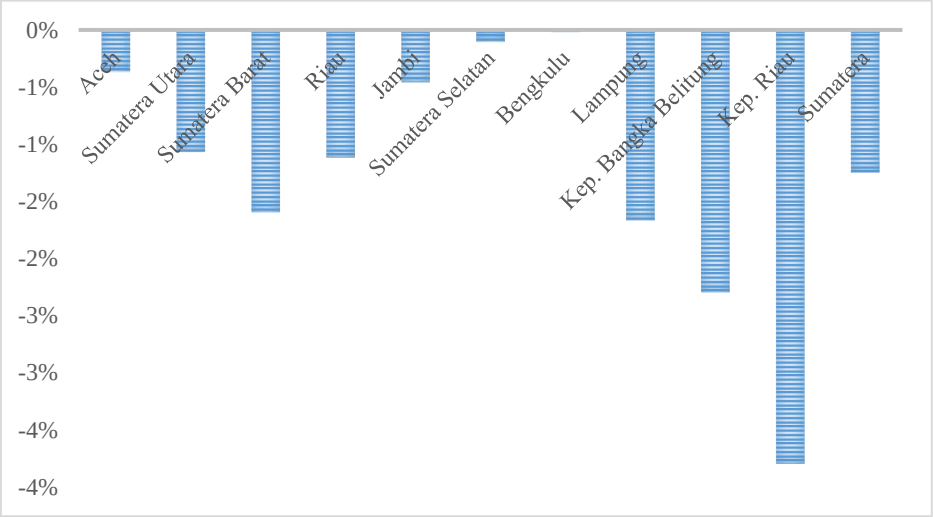

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020
(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi yang ada pada provinsi Pulau Sumatera tahun 2020 tumbuh negatif, hal ini merupakan dampak dari *covid-19* yang memberikan kontraksi buruk pada perekonomian Indonesia. Menurut BPS ekonomi Pulau Sumatera tahun 2020 mengalami penyusutan sampai -1,19% secara

year on year (yoy). Penyusutan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar -2,07%. Penyusutan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera disebabkan aktivitas ekonomi di Pulau Sumatera yang dibatasi karena adanya *covid-19*. Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 dengan penyusutan pertumbuhan ekonomi (*year on year*) terkecil ialah Provinsi Bengkulu yakni sebesar -0,02% sedangkan penyusutan pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera ialah Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar -3,80% dan -2,30%.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk menurunkan ketimpangan suatu wilayah yakni dengan mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal. Tujuan dari desentralisasi fiskal yakni: (1) menekan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar daerah; (2) memajukan taraf fasilitas publik serta menekan ketimpangan fasilitas publik antar wilayah; (3) kemampuan pemakaian sumber daya nasional; (4) tata kelola, jelas serta bertanggung jawab dalam mengimplementasi tindakan pengalokasian transfer ke tempat yang akurat dengan target, tepat guna, tepat waktu dan adil; (5) menjunjung kontinuitas fiskal dalam kebijakan ekonomi makro (Mardiasmo, 2018).

Penelitian Bonet (dalam Fajri *et al.,* 2016) mengenai hubungan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan regional di Kolombia, membuahkan hasil yang bisa disimpulkan bahwasanya setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi di tiap daerah meningkat akan tetapi ketimpangan pendapatan antar wilayah juga meningkat. Terdapat beberapa faktor

penyebab yakni lemahnya kinerja instansi pemerintah daerah, insentif yang tidak cukup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta redistribusi transfer pusat yang kurang. Variabel yang digunakan ialah variabel derajat desentralisasi fiskal yang merupakan rasio dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan tiap daerah untuk mengukur besarnya fungsi penerimaan daerah dalam memengaruhi ketimpangan antar wilayah. Berikut realisasi PAD dan penerimaan daerah di Pulau Sumatera.

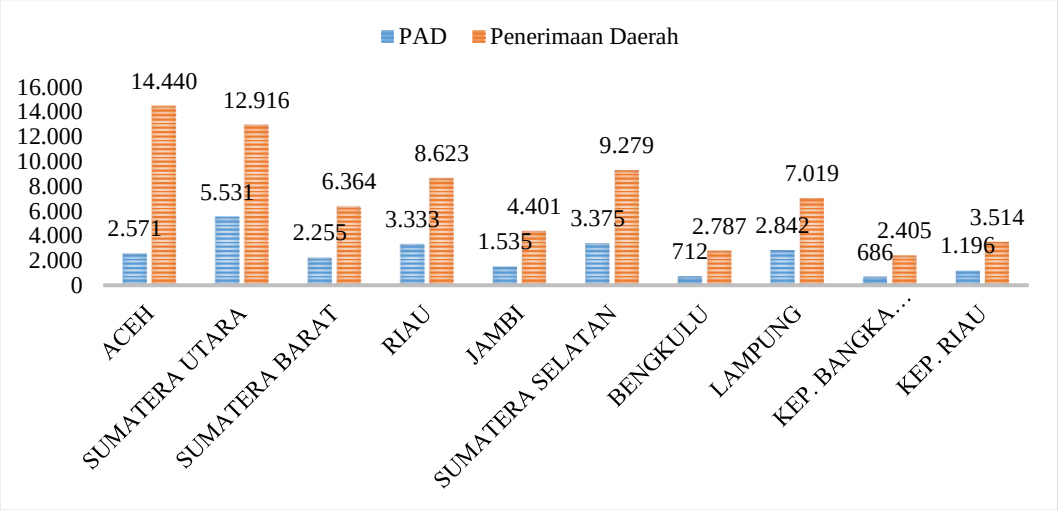

Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020 (Miliar Rupiah)

Sumber : DJPK 2020 diolah

Gambar 1.2 menunjukkan realisasi PAD dan penerimaan daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera. Provinsi yang memiliki realisasi PAD tertinggi di Pulau Sumatera ialah Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar Rp. 5.531 miliar. Realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2019. Realisasi penerimaan daerah tertinggi adalah Provinsi Aceh yakni sebesar Rp. 14.440 miliar meskipun termasuk penerimaan daerah tertinggi di Pulau

Sumatera, realisasi ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan penghematan anggaran selama pandemi *Covid-19*. Secara ekonomi, rendahnya realisasi anggaran berdampak pada kinerja perekonomian daerah, akibat lain dapat dirasakan pada pertumbuhan ekonomi.

Fiscal stress juga salah satu persoalan yang dapat merintangi proses pembangunan suatu wilayah. *Fiscal stress* bisa diartikan sebagai kondisi minusnya anggaran. Timbul jika pemerintah suatu wilayah tidak sanggup menyokong pengeluaran daerah secara independen atau pada saat PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak bisa menyanggupi belanja modal, maka situasi tersebut ialah situasi terjadinya *fiscal stress*. Situasi *fiscal stress* bisa diatasi jika tiap wilayah bisa mengeksplorasi potensi yang ada secara maksimum, sampai pada belanja daerah tidak tergantung dengan dana transfer pusat. *Fiscal stress* juga masih bisa diatasi dengan cara dengan mengurangi pembiayaan daerah agar anggaran tidak minus. Timbulnya *fiscal stress* bisa dengan mempertimbangkan kondisi APBD (Anggari, 2019).

Implementasi dari otonomi daerah yang sudah dilaksanakan masih saja terdapat persoalan yang klasik, otonomi pada bidang fiskal signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional baik di tiap provinsi maupun kabupaten, akan tetapi ketimpangan wilayah masih tetap terjadi (Fajri *et al.*, 2016). Strategi otonomi tidak hanya tergambar dari otoritas menata keuangan dan penggunaan sumberdaya daerah tetapi juga tercermin dalam keterbukaan ekonomi.

Hubungan antara keterbukaan ekonomi dengan ketimpangan wilayah masih menjadi perdebatan. Beberapa pandangan mengungkapkan bahwa keterbukaan

ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah namun beberapa pandangan lainnya mengatakan bahwa keterbukaan ekonomi dapat menaikkan tingkat ketimpangan wilayah (Wiguna & Panennungi, 2019). Pada penelitian Daumal (2010) keterbukaan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan wilayah melalui perpindahan aktivitas industri dari pusat kota ke daerah pinggiran. Penelitian Barua & Chakraborty (2010) juga membuahkan hasil yang sama yaitu perekonomian yang semakin terbuka mengakibatkan majunya pusat-pusat industri baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota kecil yang sebelumnya masih bergantung dengan kota besar. Dampaknya, ketimpangan wilayah antar kota didalam suatu negara akan menurun.

Salah satu parameter keterbukaan ekonomi ialah rasio openness, yakni perbandingan antara aktivitas ekonomi internasional terhadap PDB meskipun disebut rasio, umumnya hasil akhir ditampilkan dalam bentuk persentase. Data ekspor dan impor yang digunakan adalah data keseluruhan ekspor dan impor pada tingkat Provinsi di negara Indonesia dalam juta US dollar sementara PDEB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (Zulyanto *et al.,* 2014). Berikut data dari ekspor dan impor Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020.

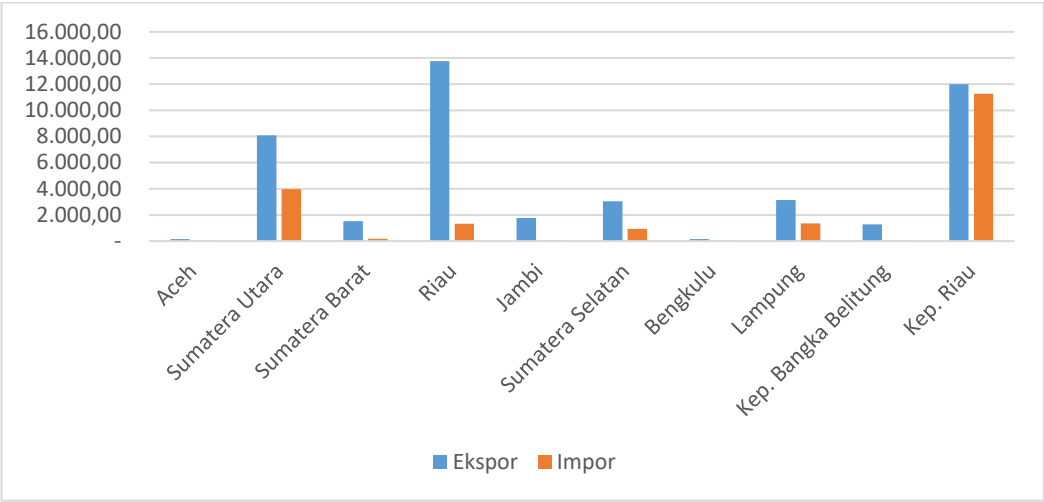

Gambar 1. 3 Ekspor dan Impor Antar Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020 (Juta USD)

Sumber : BPS 2020 diolah

Gambar 1.3 menunjukkan data ekspor serta impor yang ada pada provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020. Provinsi Riau merupakan Provinsi di Pulau Sumatera dengan nilai ekspor yang paling tinggi yakni sebesar 13.764 juta USD. Jumlah tersebut menandakan peningkatan sebesar 11,31% dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ekspor Provinsi Riau didominasi dari ekspor non migas. Nilai impor tertinggi tahun 2020 Pulau Sumatera yaitu Provinsi Kepulauan Riau sebesar 11.264 juta USD. Nilai impor Provinsi mengalami peningkatan sebesar 4,63% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini sebagian besar dikarenakan naiknya impor sektor non migas. Provinsi dengan nilai ekspor serta impor terendah di Pulau Sumatera ialah Provinsi Bengkulu yakni sebesar 154 juta USD dan 3,27 juta USD namun neraca perdagangan Provinsi Bengkulu terus menerus positif dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impor.

Pada data-data di atas, pertumbuhan ekonomi provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2020 tidak mengalami tingkat pertumbuhan yang sama serta menunjukkan tren negatif. Berlandaskan teori dan penelitian yang ada, kondisi tersebut menandakan terjadinya ketimpangan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. Perhitungan DDF provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 masuk dalam skala interval cukup. Dalam penelitian Suwanan & Sulistiani (2009) tingginya derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan namun pada provinsi Pulau Sumatera tahun 2020 meskipun derajat desentralisasi fiskal tegolong baik atau cukup tetapi ketimpangan wilayah masih tegolong tinggi. Artinya pengaruh derajat desentralisasi fiskal di provinsi Pulau Sumatera tahun 2020 berbeda dari penelitian yang sudah ada.

Fiscal stress antar provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020 tergolong tinggi. Konsekuensi dari *fiscal stress* yang tinggi akan memberikan dampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran untuk pembangunan daerah. Begitupun dengan rata-rata keterbukaan ekonomi mencapai 0,38 sedangkan rata-rata ketimpangan wilayah mengalami penurunan yakni sebesar 0,37. Artinya peningkatan keterbukaan ekonomi diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan wilayah namun beberapa penelitian menyatakan bahwa peningkatan keterbukaan ekonomi diikuti dengan meningkatnya ketimpangan wilayah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam melaksanakan pembangunan. Penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan keterbukaan ekonomi untuk

mengetahui pengaruh keempat variabel tersebut terhadap ketimpangan wilayah antar provinsi Pulau Sumatera selama 2010-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan pokok yang dibahas pada penelitian ini, yakni bagaimana pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan keterbukaan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah secara simultan dan parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, *fiscal stress* dan keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah secara simultan dan parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa untuk memahami dan mendalami permasalahan ketimpangan wilayah antar provinsi Pulau Sumatera
    b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan referensi untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketimpangan wilayah
    c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang ada untuk mendukung analisis pada penulisan skripsi ini.

b. Penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, sebagai salah satu referensi untuk mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan ketimpangan wilayah.

c. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi saat ini agar di periode yang selanjutnya ketimpangan wilayah dapat menurun

DAFTAR PUSTAKA

Aditya. (2020). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.

Agus, W. (2013). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya. *Ekonosia. Jakarta*.

Akbar, T. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2016*. Universitas Sumatera Utara.

Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *1*(2), 196–210.

Anggari, G. D. (2019). *Analisis Fiscal Stress Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017*. University of Muhammadiyah Malang.

Arnett, S. (2011). *Fiscal stress in the US states: An analysis of measures and responses*. Georgia Institute of Technology and Georgia State University.

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.

Asik, M. W. (2017). *Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Airlangga.

Aulya, V. (2016). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota provinsi jawa tengah periode 2007-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bappeda Propinsi Sumatera Selatan. (2015). *Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.* Bappenas.

Barua, A., & Chakraborty, P. (2010). Does openness affect regional inequality? A case study for India. *Review of Development Economics*, *14*(3), 447–465.

Bibi, S., Ahmad, S. T., & Rashid, H. (2014). Impact of trade openness, FDI, exchange rate and inflation on economic growth: A case study of Pakistan. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, *4*(2), 236.

Bisma, I., Gde, D., & Susanto, H. (2010). Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. *Ganec*

Swara, *4*(3), 75–86.

BPS Kepri. (2020). *Statistik Impor Provinsi Kepulauan Riau 2020*.

Daumal, M. (2010). The impact of trade openness on regional inequality: the cases of India and Brazil. *The International Trade Journal*, 28.

Depari, M. T. (2009). *Analisis Keterbukaan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah di Indonesia* (p. 111). Universitas Sumatera Utara.

Destiningsih, R., Achsa, A., & Sugiharti, R. R. (2019). Ketimpangan Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018 melalui Pendekatan Indeks Williamson. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 462–268.

Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). *Concept of fiscal decentralization and worldwide overview*. World Bank Institute Washington, DC.

Ekananda, M. (2014). *Analisis Ekonometrika Data Panel: Bagi Penelitian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Mitra Wacana.

Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *9*(2), 99–107.

Firstanto, R. (2015). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pad, Pdrb, Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. 68.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.

Hanafi, D. I., & Mugroho, T. L. (2009). *Kebijakan keuangan daerah: reformasi dan model pengelolaan keuangan daerah di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

Hani, H., Kharisma, B., & Wardhana, A. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja*, *23*(2), 179–200.

Hevesi, A. G. (2006). Analysis of fiscal stress in New York State's cities. *New York State Office of the State Comptroller Division of Local Government Services and Economic Development. New York*, *2*(1), 1–18.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.

Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis. *Retrived From Https://Dosen. Perbanas. Id/Regresi-Data-Panel-2-Tahap-Analisis*.

Islami, F. S., & Nugroho, S. B. M. (2018). Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, *33*(1), 29–39.

Kuncoro, Mudradjat. (2006). Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Dan kebijakan), edisi Keempat. In *UPP STIM YKPN: Yogyakarta*.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. In W. C. Kristiaji (Ed.), *Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta*. Erlangga.

Kurniasih, E. P. (2015). Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet. *Jurnal Eksos*, *9*(1), 36–48.

Kusmayadi, E. S., & Sugiarto, E. M. M. (2000). Metodologi penelitian dalam bidang kepariwisataan. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (III). Andi.

Muchtolifah. (2010). *Ekonomi Makro*. Unesa University Press.

Muda, I. (2012). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, *4*(1), 27–46.

Murbarani, N. (2014). *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antar Provinsi Di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *5*(2), 229–252.

Nazir, M. (2003). Metode Penelitian Cetakan Kelima. *Jakarta: Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Ningtyas, N. P. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Digital Repository Universitas Jember*.

Pratiwi, A. (2021). *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Purwanto, T. (2011). *Dampak keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asean+ 3*.

Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, *3*(4), 243–256.

Putri, R. N. P., & Mudakir, B. (2019). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007–2017). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *2*(2), 20–35.

Raditya, T. D. O. (2015). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah di Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2012*. UAJY.

Rasyid, M. R. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (S. Haris (ed.)). Lembaga Pengetahuan Indonesia.

Reschovsky, A. (2003). The Implication of State Fiscal Stress for Local Governments. *Urban Institute Conference, State Fiscal Crises: Causes, Consequences, &Solutions.*, *53706*(April), 1–26.

Setyawan, B., & Adi, P. H. (2008). Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. *Yogyakarta, Simposium Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis APTIK*.

Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, *16*(1), 40–61.

Shodiq, H. A. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Banten*. UIN Banten.

Siagian, A. R. (2010). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat)*. Universitas Diponegoro.

Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, 1–25.

Simanjuntak, R. A. (2002). Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Dalam M. Ikhsan, C. Manning, H. Soesastro (Editor), Ekonomi Indonesia Di Era Politik Baru. Jakarta: Kompas. Hlm*, 164–174.

Siregar, B. B. (2012). *Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Propinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.

Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, *12*(4), 277–286.

Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.

Sjafrizal, & Elfindri. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi* (Revisi). Baduose Media.

Sood, M. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers.

Sosilawati, Handayani, A., Wahyudi, A. R., Mahendra, Z. A., Massudi, W., Febrianto, S., & Suhendri, N. A. (2017). *Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera*. Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.

Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. In *Bandung: Alfabeta*.

Sukirno, S. (2004). Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

Susetyo, D. (2009). Elastisitas Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, *7*(14), 55–80.

Susetyo, D. (2010). Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional. *Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Pada FE UNSRI, Palembang*, *25*.

Suwanan, A. F., & Sulistiani, E. H. (2009). Fiscal decentralization and regional disparities in Indonesia: A dynamic panel data evidence. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *24*(3), 328–336.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Umiyati, E. (2014). Analisa Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *9*(2), 42–50.

Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis. In *Yogyakarta: Ekonisia*.

Wiguna, A. T., & Panennungi, M. A. (2019). Dampak Keterbukaan Perdagangan

terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia The Effect of Trade Openness on Regional Inequality in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *19*(1), 49–61.

Yanikkaya, H. (2003). Trade openness and economic growth: a cross-country empirical investigation. *Journal of Development Economics*, *72*(1), 57–89. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00068-3

Zulyanto, A., Noeraini, A. A., Badriah, L. S., & Istikomah, N. (2014). *Pencapaian MGDs di Indonesia* (S. S. Remi (ed.)). UNPAD PRESS.